

ANALISIS PERBANDINGAN PSAP NO. 4 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN DENGAN LAPORAN KEUANGAN KPP BEA CUKAI

Nizar Reza Fachruddin

Universitas Negeri Surabaya

Email: nizarreza@rocketmail.com

Abstract

KPP Bea Cukai type Tanjung Perak Surabaya Municipality is one of the government agencies engaged in Export and Import Services. KPP Bea Cukai Tipe Madya Tanjung Perak Surabaya Municipality is the main area of Customs Tax service in and out of exports and imports. But in this discussion the author only gives an overview of review notes to financial statements. notes to the statements made to help make it more easier for users to read financial statements. Based on research results. it can be concluded that the notes to the financial statements on KPP Bea Cukai Tipe Madya Tanjung Perak Surabaya, in the formulation according to the PSAP number 4. In a review accompanying Notes to Financial Statements on KPP Bea Cukai Tipe Madya Tanjung Perak Surabaya already present in accordance with the PSAP number 4.

Keywords: *public sector accounting, government sector accounting*

PENDAHULUAN

Penyajian laporan keuangan pada setiap entitas diwajibkan menyajikan catatan atas laporan keuangan(CALK). Catatan atas laporan keuangan disajikan sebagai bagian yang tidak terpisah dari laporan keuangan yang bertujuan umum. Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan keuangan yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pengguna akan informasi akuntansi yang wajar. Pengguna dalam konteks ini adalah masyarakat, legislative, lembaga pengawas, pemeriksa, pihak yang memberi donasi, investasi, pinjaman, dan pemerintah. Catatan atas laporan keuangan harus disajikan secara sistematis. Yaitu, setiap pos dalam laporan realisasi

anggaran, neraca dan laporan arus kas harus mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam catatan atas laporan keuangan.

Catatan atas laporan keuangan terdiri dari penjelasan atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam suatu laporan realisasi anggaran, neraca, dan laporan atas arus kas. Didalam catatan atas laporan keuangan juga terdapat penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh pernyataan standar akuntansi pemerintah serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk memenuhi laporan keuangan yang wajar.

Memahami pentingnya catatan atas laporan keuangan dan pengungkapan-pengungkapan yang ada didalamnya, maka informasi yang ada di dalam catatan atas laporan keuangan harus didukung dengan catatan-catatan penjelasan. Catatan-catatan penjelasan tersebut terdiri dari kebijakan akuntansi, pengungkapan atas hal-hal yang signifikan yang tidak memenuhi criteria pengakuan dan informasi tambahan yang diminta oleh standar FASB (*financial accounting standart board*), dan rincian dari jumlah yang tercantum dalam neraca.

Atas dasar latar belakang yang telah dijelaskan diatas maka munculah PP No. 24 tahun 2005 tentang standar akuntansi pemerintahan (SAP) yang kemudian memicu munculnya peraturan-peraturan lainnya, diantaranya PMK No. 59 tahun 2005 yang digantikan dengan PMK 171 tahun 2007 tentang system akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah pusat.

Peraturan pemerintah ini kemudian menjadi acuan peraturan Dirjen Perbendaharaan No. 24 tahun 2006 yang telah disempurnakan dengan peraturan Dirjen Perbendaharaan No. 51 tahun 2008 tentang pedoman penyusunan laporan keuangan kementerian Negara/lembaga. (Warta Bea Cukai; maret 2010).

Dalam lingkup Bea Cukai, laporan keuangan memiliki peran yang sangat penting. Sebagai salah satu badan usaha milik Negara yang kegiatannya di bidang ekspor-impor dan cukai, akuntabilitas dan transparansi dalam structural Bea Cukai sangat diperlukan. Dalam KPP Bea Cukai tidak tercantum kebijakan fiscal ekonomi makro pencapaian target Undang-Undang APBD dan ikhtisar pencapaian kinerja keuangan. Sedangkan dalam PSAP No 4 harus mengungkapkan dan menyantumkan sesuai dengan susunan PSAP. Sehingga akan berdampak pada pelaporan laporan keuangan yang akan membuat pengguna laporan keuangan (masyarakat, legislatif, lembaga pengawas, pemeriksa, pihak yang memberi atau berperan dalam donasi, investasi, dan pinjaman serta pemerintah) tidak dapat membuat penilaian secara handal jika laporan keuangan tidak mengungkapkan dengan jelas masalah yang pernah terjadi di tahun sebelumnya.

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijabarkan diatas tersebut, maka penulis dapat menyimpulkan adanya permasalahan sebagai berikut:

Apakah ditemukan perbedaan penyusunan Catatan Atas Laporan Keuangan pada KPP Bea Cukai dengan ketentuan PASAP No. 4?

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: Untuk mengetahui apakah ada perbedaan antara Catatan atas laporan keuangan pada KPP Bea dan cukai dengan PSAP No.4.

TINJAUAN PUSTAKA

Akuntansi Sektor Publik

Organisasi sektor publik sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari untuk memberikan pelayanan kepada publik. Organisasi sektor publik selalu menyentuh kehidupan publik. Dengan demikian, organisasi sektor publik dituntut untuk lebih transparan dan memberikan akuntabilitas kepada publik.

Organisasi sektor publik memiliki kaitan yang erat dengan kehidupan publik dan memiliki wilayah yang lebih luas dan lebih kompleks daripada sektor swasta atau sektor privat (bisnis atau perusahaan). Organisasi sektor publik lebih banyak berkaitan dengan kehidupan publik, seperti dalam memberikan pelayanan dan memenuhi kebutuhan publik. Organisasi sektor publik meliputi pemerintahan (baik pemerintah daerah maupun pusat), badan layanan umum, yayasan, lembaga swadaya masyarakat, perusahaan milik Negara dan daerah, rumah sakit, universitas, sekolah-sekolah dan organisasi nonprofit lainnya.

Dewasa ini organisasi sektor publik dituntut untuk melaksanakan akuntabilitas publik. Selama ini, organisasi sector public dianggap kurang ekonomis, kurang efisien, kurang efektif, dan kurang transparan. Oleh karena itu, organisasi sektor publik dituntut untuk lebih ekonomis, efisien, efektif, transparan, dan akuntabilitas. Tuntutan untuk berakuntabilitas, bertransparansi, dan berkonsep *value for money* menyebabkan organisasi sektor publik berusaha mengembangkan akuntansi sektor publik, khususnya pemerintah. Konsep *value for money* didasarkan pada tiga elemen utama, yaitu: 1) Ekonomi adalah upaya untuk memperoleh input dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada harga terendah. Henley et al (1990) mendefinisikan ekonomi sebagai biaya minimal atas input untuk melakukan aktivitas yang dibeli dengan biaya paling murah; 2) Efisiensi adalah upaya untuk memperoleh output yang optimal dengan input tertentu. Efisiensi merupakan perbandingan antara input dan output; 3) Efektif adalah tingkat pencapaian hasil dengan target yang telah ditentukan. Efektif merupakan perbandingan antara input dan outcome. Henley et al (1990) mendefinisikan efektivitas sebagai hubungan antara tingkat keberhasilan atau kegagalan yang dicapai dalam tujuan. Efektivitas berhubungan dengan pencapaian outcome.

Akuntansi sektor publik memiliki peran utama untuk menyiapkan laporan keuangan sebagai salah satu bentuk pelaksanaan akuntabilitas publik. Akuntansi dan laporan keuangan mengandung, pengertian sebagai suatu proses pengumpulan, pengolahan, dan pengkomunikasian informasi yang

bermanfaat untuk pembuatan keputusan dan untuk menilai kinerja organisasi. Karena kebutuhan informasi di sektor publik lebih bervariasi, maka informasi tidak terbatas pada informasi keuangan yang dihasilkan dari sistem akuntansi organisasi. Informasi non moneter seperti ukuran output pelayanan harus juga dipertimbangkan dalam pembuatan keputusan. (Mardiasmo:2004)

Terdapat beberapa alasan mengapa perlu dibuat laporan keuangan. Dilihat dari manajemen perusahaan, laporan keuangan merupakan alat pengendalian dan evaluasi kinerja manajerial dan organisasi. Sedangkan dari sisi pemakai eksternal, laporan keuangan merupakan salah satu bentuk mekanisme pertanggungjawaban dan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Beberapa otoritas keuangan disektor swasta, seperti pasar modal dan lembaga pengawas pasar modal, mensyaratkan dibuatnya laporan keuangan yang telah diaudit untuk memberikan jaminan keandalan dan dapat dipercayainya laporan keuangan, selain itu laporan keuangan, selain itu laporan keuangan perlu dilampiri pengungkapan (*disclousure*) mengenai informasi-informasi yang dipengaruhi keputusan.

Berikut ini adalah tabel perbedaan antara perusahaan sektor publik dengan perusahaan sektor swasta:

Tabel 1.1 perbedaan sektor publik dengan sektor swasta

Sektor publik	Sektor swasta
Motif mencari laba bukan tujuan utama bagi organisasi sektor publik	Tujuan utama adalah mencari laba.
Sumber pendanaan dari pajak, retribusi, sumbangan, atau subsidi dari pemerintah pusat, transfer pendapatan antarorganisasi, utang atau obligasi.	Sumber pendanaan dari modal sendiri, saldo laba, penerbitan saham, obligasi, atau utang bank
Kepemilikan sektor publik dimiliki secara kolektif oleh masyarakat.	Kepemilikan sektor swasta oleh para pemegang saham.
Bersifat <i>multiple accountability structure</i> , khususnya pemerintahan memberikan pertanggungjawaban kepada masyarakat dan parlemen, badan pengawas, pemerintah pusat dan daerah, investor/kreditor, pemberi donor, dan Negara lain yang terkait. Sementara organisasi sektor publik lainnya memberikan pertanggungjawaban kepada seluruh anggota, pemberi dana yayasan atau pemberi dana sumbangan.	Bersifat dual accountability structure di mana pihak manajemen memberi pertanggungjawaban kepada dua pihak, yaitu para pemegang saham dan kreditor.
Menggunakan basis kas dan basis akrual. Basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam laporan realisasi anggaran dan basis akrual untuk pengakuan asset, kewajiban, dan ekuitas dalam neraca.	Sektor swasta menggunakan basis akrual
Tolok ukur yang dicapai sulit diidentifikasi secara jelas. Tolok ukur yang dicapai apakah pencapaian kepuasan masyarakat, atau keberhasilan dalam memanfaatkan dana sesuai dengan anggaran yang telah disetujui atau pencapaian pengelolaan keuangan secara ekonomis, efisien, efektif (perlu adanya persepsi)	Tolok ukur yang dicapai oleh swasta sudah jelas, yaitu mencari laba.

Sumber : Wuryani Andayani

Adapun tujuan dan fungsi pembuatan laporan keuangan dalam perusahaan sektor publik adalah sebagai berikut: 1) Kepatuhan dan

pengelolaan (*compliance and stewardship*): Laporan keuangan digunakan untuk memberikan kepada pengguna laporan keuangan dan pihak otoritas bahwa pengelolaan sumber daya telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan lain yang telah ditetapkan; 2) Akuntabilitas dan pelaporan Retropektif (*accountability and retrospective reporting*): Laporan keuangan digunakan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik. Laporan keuangan digunakan untuk memonitor kinerja dan mengevaluasi manajemen, memberikan dasar untuk mengamati *trend* antar kurun waktu, pencapaian atas tujuan yang telah ditetapkan, dan membandingkannya dengan kinerja organisasi lain yang sejenis jika ada. Laporan keuangan juga memungkinkan pihak luar untuk memperoleh informasi biaya atas barang dan jasa yang diterima, serta memungkinkan bagi mereka untuk menilai efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya organisasi; 3) Perencanaan dan informasi otoritas (*planning and authorization information*): Laporan keuangan berfungsi untuk memberikan dasar perencanaan kebijakan dan aktivitas di masa yang akan datang. Laporan keuangan berfungsi untuk memberikan informasi pendukung mengenai otoritas penggunaan dana; 3) Kelangsungan organisasi (*viability*): Laporan keuangan berfungsi untuk membantu pembaca dalam menentukan apakah suatu organisasi atau unit kerja dapat meneruskan menyediakan barang dan jasa (pelayanan) di masa yang akan datang; 4) Hubungan masyarakat (*public relation*): Laporan keuangan berfungsi untuk memberikan kesempatan kepada organisasi untuk

mengemukakan pernyataan atas prestasi yang telah dicapai kepada pemakai yang pengaruhi, karyawan, dan masyarakat. Laporan keuangan berfungsi sebagai alat komunikasi dengan publik dan pihak-pihak lain yang berkepentingan; 5) Sumber fakta dan gambaran (*source of facts and figures*) : Laporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi kepada berbagai kelompok kepentingan yang ingin mengetahui organisasi secara lebih dalam.

PSAP No. 4 Tahun 2005

Pernyataan Standar akuntansi Pemerintah No. 4 tahun 2005 mengatur tentang catatan atas laporan keuangan. Tujuan pernyataan standar ini mengatur penyajian dan pengungkapan yang diperlukan pada catatan atas laporan keuangan. Tujuan umum dari standar ini adalah laporan yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pengguna akan informasi akuntansi keuangan yang lazim. Yang dimaksud dengan pengguna adalah masyarakat, legislatif, lembaga pengawas, pemeriksa, pihak yang member donasi, investasi, dan peminjam.

Pernyataan standar ini berlaku untuk entitas pelaporan dalam menyusun laporan keuangan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan laporan keuangan konsolidasian, tidak termasuk perusahaan Negara/daerah.

Suatu entitas yang bukan merupakan entitas pelaporan dapat menyajikan laporan keuangan untuk tujuan umum. Bila hal ini digunakan, maka standar ini harus diterapkan oleh entitas tersebut walaupun tidak

memenuhi criteria suatu entitas pelaporan sesuai dengan peraturan dan standar akuntansi yang mengatur mengenai entitas pelaporan pemerintah.

Catatan atas laporan keuangan dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya pada pembaca tertentu ataupun manajemen entitas pelaporan. Oleh karena itu, laporan keuangan mungkin mengandung informasi yang dapat mempunyai potensi kesalahpahaman diantara pembacanya. Untuk menghindari kesalahpahaman, laporan keuangan harus dibuat catatan atas laporan keuangan yang berisi informasi untuk memudahkan pengguna dalam memahami laporan keuangan.

Kesalahpahaman dapat saja disebabkan oleh persepsi dari pembaca laporan keuangan. Pembaca yang terbiasa dengan orientasi anggaran mempunyai potensi kesalahpahaman dalam memahami konsep akuntansi akrual. Pembaca yang terbiasa dengan laporan keuangan sector komersial cenderung melihat laporan keuangan pemerintah seperti laporan keuangan perusahaan. Untuk itu, diperlukan pembahasan umum dan referensi ke pos-pos laporan keuangan menjadi penting bagi pembaca laporan keuangan.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian yang digunakan tentang Tinjauan Catatan atas Laporan Keuangan adalah penelitian deskripsi artinya hasil penelitian disampaikan dalam bentuk deskripsi yang bersifat kualitatif. Penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk

mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia.

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 1) Data Sekunder. Merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung, yaitu dari daftar pustaka melalui *study* literatur terhadap buku-buku teks. Selain itu diperoleh juga dari KPP Bea Cukai. Mengenai sejarah perusahaan, Struktur perusahaan, struktur organisasi, dan yang terkait dengan pembahasan penelitian; 2) Data Primer. Merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber yang diteliti, yaitu di divisi keuangan KPP Bea Cukai. Data ini diperoleh berdasarkan wawancara yang dilakukan dan dokumentasi, yaitu mengenai Tinjauan Catatan atas Laporan Keuangan.

Dalam mengumpulkan data diperlukan suatu metode pengumpulan data, untuk memperoleh data yang berkualitas. Data yang diperoleh penulis adalah data dari KPP Bea Cukai. Ada beberapa cara untuk mendapatkan data, yaitu: 1) dokumentasi, dokumentasi adalah suatu cara untuk mencari data, dimana penulis mencari data yang telah tersedia pada KPP Bea Cukai bersangkutan;. Dimana teknik ini hanya menyalin data yang sudah tersedia dalam catatan KPP Bea Cukai yang ada hubungannya dengan laporan keuangan; 2) Studi Pustaka. Cara pengumpulan data yang dilakukan dengan mempelajari, mencari dan mengembangkan hasil temuan dari penelitian yang ada hubungannya dengan judul penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

KPP Bea Cukai Tipe Madya Surabaya merupakan salah satu instansi pemerintah yang bergerak dibidang pelayanan Ekspor dan Impor . Tetapi pada pembahasan ini penulis hanya memberi gambaran tentang tinjauan catatan atas laporan keuangan. Dimana catatan atas laporan dibuat untuk membantu agar lebih mempermudah para pengguna untuk membaca laporan keuangan.

Tabel 1.2: Perbedaan KPP Bea Cukai dengan PSAP No. 4

PSAP No 4 tahun 2005	KPP Bea Cukai Surabaya	Keterangan
Kebijakan fiskal, ekonomi makro, pencapaian target undang-undang APBD/perda APBD	Belum menyajikan secara lengkap tentang kebijakan fiskal, ekonomi makro	Tidak sesuai
Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan	Belum menyajikan pencapaian kinerja keu.	Tidak sesuai
Dasar penyajian laporan keuangan dan pengungkapan kebijakan akuntansi	Sudah menyajikan kebijakan akuntansi, isi kebijakan akuntansi	Sudah sesuai
Pengungkapan informasi yang diharuskan oleh PSAP yang belum disajikan pada lembar muka keuangan	Sudah menyajikan informasi yang belum disajikan pada lembar muka keuangan	Sudah sesuai
Pengungkapan informasi untuk pos-pos asset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja	Sudah menyajikan informasi mengenai pos-pos asset, neraca, dan kewajiban yang timbul karena basis akrual dan kas	Sudah sesuai
Pengungkapan-pengungkapan informasi penting lainnya	Sudah mengungkapkan informasi atau catatan penting lainnya.	Sudah sesuai

sumber: diolah

Perbedaan PSAP No 4 Dengan penyusunan Catatan atas laporan keuangan pada KPP Bea Cukai

Struktur dan isi PSAP No 4: a) Kebijakan fiskal.keuangan ekonomi makro, pencapaian target undang-undang APBD/perda APBD; b) Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan; c) Dasar penyajian laporan keuangan dan pengungkapan kebijakan akuntansi keuangan; d) Pengungkapan informasi yang diharuskan oleh PSAP yang belum disajikan dalam lembar muka keuangan; e) Pengungkapan informasi untuk pos-pos asset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja; f) Pengungkapan-pengungkapan lainnya

Struktur dan isi pada KPP Bea Cukai

Pada KPP Bea Cukai tipe madya tanjung perak Surabaya tidak mencantumkan: a)Kebijakan fiskal.keuangan ekonomi makro, pencapaian target undang-undang APBD/perda APBD; b) Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan tahun berjalan. Hal ini dapat menyebabkan para pemakai laporan keuangan tidak bisa membuat penilaian dan keputusan keuangan secara handal dikarenakan laporan keuangan tidak mengungkapkan dengan jelas kebijakan fiskal, keuangan ekonomi makro, pencapaian target undang-undang APBD/perda APBD. Dan tidak bisa mengetahui tingkat efesiensi dan efektifitas kinerja keuangan.

Adapun pentingnya kebijakan fiskal, ekonomi makro yaitu kebijakan yang digunakan pemerintah dalam menjalankan dan mengawasi jalannya

sistem perekonomian, di dalam kebijakan ini terdapat juga ekonomi makro yang mempunyai fungsi yang cukup besar dalam perekonomian meliputi tingkat inflasi, tingkat suku bunga, nilai tukar rupiah pada saat periode pencatatan laporan keuangan. Kebijakan fiskal dan ekonomi makro mempunyai hubungan erat dengan pendapatan belanja negara. Disisi lain pemerintah harus sangat mengawasi suatu kebijakan sehingga dapat secara optimal memberikan pemasukan pendapat dari segala bidang. Dalam KPP Bea dan Cukai demikian sama dengan kebijakan pemerintah apabila salah dalam mengawasi kebijakannya maka KPP Bea dan Cukai akan mengalami penurunan pendapatan, dikarenakan pendapatan dalam export dan import akan kurang optimal diakibatkan oleh tingkat inflasi dan nilai tukar rupiah yang mengalami penurunan maka biaya operasional dan pendapatan dari para investor yang memasukan barangnya akan meningkat namun pendapatan akan berkurang karena perbedaan kurs rupiah yang melemah.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan tentang catatan atas laporan keuangan yang dilaksanakan pada KPP Bea Cukai Tipe Madya Tanjung Perak Surabaya, maka penulis dapat menyimpulkan: 1) Penyusunan catatan atas laporan keuangan pada KPP Bea Cukai sudah disajikan sesuai dengan PSAP No 4 namun belum secara menyeluruh, terdapat perbedaan antara PSAP No

4 dengan praktik pada KPP Bea Cukai, yaitu tidak mencantumkan kebijakan fiskal, ekonomi makro dan ikhtisar kinerja keuangan. Yang menyebabkan pembaca laporan keuangan tidak dapat memahami isi dari laporan keuangan tersebut; 2) Kebijakan akuntansi pada KPP Bea Cukai tipe madya tanjung perak sudah mengacu pada Standart Akuntansi Pemerintah (SAP) yang telah ditetapkan dengan peraturan pemerintah Nomor 24 tahun 2005 yaitu basis Akrua; 3) Catatan penting lainnya sudah disajikan dengan terperinci sehingga para pengguna dapat memahami dengan baik; 4) Laporan realisasi anggaran sudah disusun menggunakan basis kas; 5) Penjelasan pos-pos laporan realisasi anggaran pada KPP Bea Cukai tipe madya tanjung perak surabaya sudah sesuai dengan Standart Akuntansi pemerintah yang memberikan penjelasan secara terperinci.

Saran

Saran saya sebaiknya KPP Bea Cukai lebih melengkapi lagi dalam penyusunan laporan keuangan dalam hal catatan atas laporan keuangan yang sesuai dengan PSAP No. 4. Dengan menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal dan tentang ikhtisar pencapaian kinerja keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Darise, Nurlan. 2008. *Akuntansi Keuangan Daerah (Akuntansi Sektor Publik)*. Jakarta: Indeks
- Andayani, Wuryan. 2006. *Akuntansi Sektor Publik* Malang : Bayumedia.

Bastian, Indra. 2002. *Sistem Akuntansi sektor publik 1*. Jakarta Salemba Empat

Bastian, Indra. 2002. *Sistem Akuntansi sektor publik 2*. Jakarta Salemba Empat

Komite Standart Akuntansi Pemerintah. 2007. *Pernyataan Standart Akuntansi Pemerintah*. Jakarta : Salemba Empat

Mardiasmo. 2004. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta : Andi